

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam, H. R. Kriminologi Cet. III. Jakarta: Restu Agung. 2007
- Alting, Husein. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Yogyakarta: LaksBang PersSindo. 2010
- Arrasjid, Chairun. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Azhari. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI Press. 1995
- Dewi C Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Stauru Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2010, h 3
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni. 1984
- Friendman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (The Legal System A Sosial Science Perspective). Bandung: Nusamedia. 2009
- Kamil, Ahmad dan Fausan, M. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Kanter, E. Y dan Sianturi, S. R. Asas-Aas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika. 2002
- Kelana, Momo. Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Komperatif. Jakarta: PTIK. 1972
- Koesnoe, Moch. Hukum Adat Dewasa Ini. Jakarta: Pradnya Paramita. 1978
- \_\_\_\_\_. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya: Airlangga University Press. 1979
- Martokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Yogyakarta: Liberty. 2007
- \_\_\_\_\_. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1999

- Poerwadarminta, W. J. S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1985
- Pramono, B. S. Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: Usaha Nasional, 2006
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Alumni. 1982
- Ragawino, Bewa. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung: Universitas Padjajaran. 2008
- Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum di Indonesia. Semarang: UNDIP. 1989
- \_\_\_\_\_. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
- Rajab, Untung S. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Inodneus dalam Sistem Ketatanegaraan. Bandung: CV. Utomo. 2003
- Sarwono, Sarlito Wirawan. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h 33
- Simpul, Baringbing. Mewujudkan Superemasi Hukum. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi. 2001
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994
- \_\_\_\_\_. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. 1983
- \_\_\_\_\_. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1982
- \_\_\_\_\_. Sosisologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- \_\_\_\_\_. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Soepomo, R. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Universitas. 1996
- Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 1989
- Sukanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta: Rajaawali Press. 1981

- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris: Penegakan Hukum. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. 1995
- Wigjodipuro, Surojo. Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 1982
- Wulandari, C Dewi. Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar). Jakarta: Refika Aditama. 2010
- \_\_\_\_\_. Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar). Jakarta: Refika Aditama. 2016
- Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Lhoksumawe: Unimal Press. 2016

#### **LAPORAN DAN JURNAL**

- Buku register laporan polisi Reskrim B. 01 Puncak Jaya Tahun 2018-2020
- Abdurrahman et al, "Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kemenkumham 2015
- Amin, Hamid Muhammad dkk, "Penerapan Hukum Pidana Adat Enggros Tobati Papua dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional", Jurnal, Magister Hukum, Fakultas Hukum Program Magister Universitas Hasanuddin, Makassar
- Anshar, Ryanto Ulil dan Setiyono, Joko. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Griapon, Kristian V dan Ma'arif, Samsul. "Pola Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua", Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 4 Nomor 1, April 2016

- Hastanti, Baharinawati W. “Kondisi Lingkungan dan Karakteristik Sosial Budaya Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus pada Suku Dani di Jayawijaya, papua)”, Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol. 1 No.2 Oktober 2017
- Immanuel, Gerald Liem. “Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Lex Crimen Vol. II/ No. 5/ September 2013
- Jainah, Zainab Ompu. “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, Journal of Rural and Development. Volume III No. 2 Agustus 2012
- Manarisip, Marco. “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional”, Jurnal Lec Crimen Vol. I/No.4/Okt-Des/ 2012
- Mulyadi, “Intersepsi Budaya Lokal dalam Membentuk Model Pola Perilaku Aparatur Pemerintah Putra Daerah di Kabupaten Puncak Jaya”. Jurnal Ekologi Birokrasi, Vol 5 No. 3 Agustus 2017
- Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008
- Sulastriyono dan Aristya, Sandra Dini Febri. “Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata”, Mimbar Hukum Vol 24 Nomor 1, Februari 2012
- Tasaripa, Kasman. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”, Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

## **PERATUR DAN UNDANG-UNDANG**

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai DI Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018

#### **SUMBER ONLINE**

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum” (On-Line), tersedia di [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (25 Agustus 2020)

Humanitarian, “Papua” (On-Line), tersedia di <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/PAPUA.pdf> (21 Agustus 2020)

Kaya, Indonesia. “Dani, Sang Penghuni Lembah Baliem” (On-Line), tersedia di <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/dani-sang-penghuni-lembah-baliem> 21 Agustus 2020)

Muhammad, Sofyan. “Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Nasional” (On-Line), tersedia di <https://www.suarakpk.com/2020/01/hukum-adat-sebagai-sumber-hukum-nasional.html?m=0> (20 Agustus 2020)

Nabire, Pengadilan Negeri. “Deskripsi Wilayah” (On-Line), tersedia di <http://pn-nabire.go.id/deskripsi-wilayah/> 7 Januari 2021

Papua, Pemerintah. “Sekilas Papua” (On-Line), tersedia di <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html> (21 Agustus 2020)

- Papua, Penghubung. “Kabupaten Puncak Jaya” (On-Line), tersedia di <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/la-pago/kabupaten-puncak-jaya/>, 7 Januari 2021
- Permana, Eka Rizky. “Hukum Adat dan Penerapannya dalam Hukum Nasional di Indonesia”, (On-Line), tersedia di <https://www.pnbajawa.com/index.php/component/content/article?id=185&Itemid=101> (16 Agustus 2020)
- Polri, “Sejarah Polri”, (On-Line), tersedia di [https://www.polri.go.id/tentang-sejarah?TSPD\\_101\\_R0=08610f78c8ab2000447cbf4341fef27dc1c29e616d5004d4b72923db91c4a52fc7e8e51b215b7259088fab6e3114480001ccf071d9107d631d36e3c94312401e36edcb42b4af22d057dae3a8dfa08e004375f29564750ce3fe9aa29f8bd3ae3cc8084046afb71276cc72ae465361a31124e1f068c43e2fa2](https://www.polri.go.id/tentang-sejarah?TSPD_101_R0=08610f78c8ab2000447cbf4341fef27dc1c29e616d5004d4b72923db91c4a52fc7e8e51b215b7259088fab6e3114480001ccf071d9107d631d36e3c94312401e36edcb42b4af22d057dae3a8dfa08e004375f29564750ce3fe9aa29f8bd3ae3cc8084046afb71276cc72ae465361a31124e1f068c43e2fa2) (20 Agustus 2020)
- Purwanti, Puput. “Apa Itu Hukum Positif beserta Sumber Hukumnya” (On-Line), tersedia di <https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif> (20 Agustus 2020)
- Yas, Trie. “Hukum Adat Vs Hukum Negara (Papua)” (On-Line), tersedia di <https://www.kompasiana.com/lannang/5557aa57739773725733ff23/hukum-adat-vs-hukum-negara-papua> (20 Agustus 2020)